

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Andi Hamzah, 2006, ***Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional***, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Badan Penerbit FH Undip, Semarang.
- _____, 2003, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Efi Laila Kholis, 2010, ***Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi***, Solusi Publishing, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2000, ***Tindak Pidana Korupsi***, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendi, 2010, ***Pemberantasan Korupsi dan Good Governance***, PT. Timpani, Jakarta.
- Marwan Mas, 2014, ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 2008, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta.
- Robert Klitgaard, 2005, ***Membasmi Korupsi (Terjemahan)***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sri Sumarwani, 2012, ***Sejarah Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Undip Press, Semarang.
- Sudarto, 2009, ***Hukum Pidana I***, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang.
- Syed Hussein Alatas, 1986, ***Sosiologi Korupsi***, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) Nomor: Per-067/A/JA/07/2007 tentang kode perilaku jaksa

Jurnal :

Ade Paul Lukas, *Efektifitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No.3 Mei 2010.

Aziz Syamsuddin, *Dukungan Legislatif dalam RUU KUHP Untuk Pemberantasan Korupsi: Pro dan Kontra Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP*, Jurnal Hukum, Vol XXXII, No.2, Tahun 2015.

Eclesia Sembel, *Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001*, dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

Fazzan, *Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Islam*. Dalam Jurnal Ilmiah Islam Future, Vol. 14, No. 2 Februari 2015.

Frans Rudy Putra Zebua, Iman Jauhari, dan Taufik Siregar, *Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Uang Negara Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, dalam Jurnal Mercatoria, Vol. 1 No.2 Tahun 2008.

Yasmirah Mandasari Saragih, ***Peran Jaksa Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi***, Dalam Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol. 1 No. 3 Oktober 2015.

Karya Tulis Ilmiah :

Hendarman Supandji, ***Substansi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi***, Makalah Penataran Tindak Pidana Korupsi Puslitbang Kejaksaan Agung R.I. tanggal 5-6 Juli 2006.

Muladi, ***Beberapa Dimensi dari Tindak Pidana Korupsi***, Suatu Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana IV, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED, 1990.

Internet :

http://www.academia.edu/download/35764104/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, Diunduh Pada Hari Minggu Tanggal 4 November 2018 Pukul 16.02.

<https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=indonesia+sebagai+negara+hukum>, Diunduh Pada Hari Minggu Tanggal 4 November 2018 Pukul 21.55